

PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

Gunawan Adi Pratio

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Hanif Assabib Rosyid

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

***Abstract.** Evaluation is an activity that is absolutely necessary in regional development. Various laws and regulations state that evaluation activities are activities that must be carried out by each region, for example evaluating the implementation of the RKPD or RPJMD. In addition, evaluation can also be carried out based on specific needs and goals.*

***Keywords:** evaluation, regulation, development.*

Abstrak. Evaluasi merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pembangunan daerah. Berbagai peraturan perundangan menyatakan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap daerah, misalnya evaluasi pelaksanaan RKPD atau RPJMD. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan tertentu.

Kata kunci: evaluasi, peraturan, pembangunan.

LATAR BELAKANG

Menurut Local Economic and Employment Development atau LEED (2009) evaluasi dalam terminologi ekonomi adalah penentuan perkembangan kemajuan dari kebijakan, program, atau proyek yang menyebabkan perubahan. Evaluasi merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pembuatan kebijakan dan perencanaan. Evaluasi memungkinkan desain dan modifikasi kebijakan dan program yang dibuat dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengertian lain dari evaluasi diungkapkan oleh Chelimsky (1989) yaitu suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program. Wirawan (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Dari beberapa pengertian yang ada memberikan

Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; Desember 14, 2022

* Gunawan Adi Pratio

pengertian yang secara substantif sama, bahwa evaluasi merupakan cara yang dipergunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari program atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, melalui suatu metode tertentu.

Menurut LEED (2009) evaluasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif (*summative evaluation*). Evaluasi formatif merupakan evaluasi terhadap suatu proses sedangkan evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap dampak atau *outcome*. Evaluasi formatif berfokus pada bagaimana program dijalankan sedangkan evaluasi sumatif berfokus pada bagaimana hasil dari program tersebut.

Menurut LEED (2009) pengertian evaluasi berbeda dengan pengertian monitoring. Monitoring berkaitan dengan apa yang terjadi berdasarkan informasi yang dikumpulkan sementara evaluasi memberikan dasar dalam justifikasi dan keputusan antara “ya” dan “tidak”, misalnya hasil evaluasi menyimpulkan suatu program “tercapai” dan “tidak tercapai” atau “sesuai” dan “tidak sesuai”, dan sebagainya. Untuk itu dalam evaluasi dibutuhkan data yang *reliable*, akurat, dan mutakhir (LEED, 2009:11). Solihin (2012) membedakan monitoring dan evaluasi dari aspek: tujuan, fokus, cakupan, serta waktu pelaksanaan. Dalam hal tujuan misalnya, monitoring menilai kemajuan dalam pelaksanaan program sementara evaluasi memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program. Dalam hal waktu, monitoring dilakukan secara terus menerus atau berkala selama pelaksanaan program sedangkan evaluasi dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program.

GAMBARAN UMUM MAKROEKONOMI KOTA SURAKARTA

Visi Dan Misi Kota Surakarta

Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

Visi :

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Surakarta perlu melakukan kerjasama dengan daerah sekitar. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh posisi geografis Surakarta yang sangat strategis. Dalam RPJMD, sesuai RTRW Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukawonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki SDA, kesuburan tanah, dan objek wisata. Dalam regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dijadikan kawasan peruntukan industri skala wilayah untuk produk-produk unggulan berbasis industri kerajinan dan kawasan pariwisata.

Tingkat ketercapaian visi-misi dituangkan melalui berbagai indikator. Antara lain indikator makroekonomi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD. Indikator tersebut dipergunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi kinerja makroekonomi.

Tema Pembangunan Kota Surakarta

Berdasarkan visi dan misi yang ada, tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2019 adalah “Pengembangan Daya Saing Kota didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya”, yang merupakan kelanjutan pencapaian pembangunan periode sebelumnya, dengan menambahkan penekanan pada penguatan daya saing serta kemandirian masyarakat. Tema ini fokus pada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk kota, dan peningkatan jumlah pengunjung luar kota yang beraktivitas di Kota Surakarta. Dampak lain yang diharapkan adalah penambahan jumlah variasi produk, jasa, dan event kota yang melibatkan pelaku dari

luar daerah dan kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan.

Program dan kegiatan pembangunan juga diprioritaskan pada hal yang berdampak menguatkan kearifan budaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menjaga keadilan antar golongan kelompok masyarakat, dan menguatkan kesiagaan masyarakat untukantisipasi bencana (baik bencana alam maupun bencana sosial). Program dan kegiatan tersebut disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Semua hal tersebut diintegrasikan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta Tahun 2019.

Evaluasi makroekonomi Kota Surakarta secara substantive tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan RKPD karena makroekonomi meruakan salah satu aspek dalam dokumen RKPD. Sementara itu, dokumen RKPD idelanya juga berlandaskan pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Hal ini mengingat bahwa RKPD pada dasarnya adalah tahapan dalam upaya pencapaian RPJMD.

Dengan demikian, evaluasi aspek makroekonomi bukanlah evaluasi RKPD secara keseluruhan mengingat luasnya cakupan RKPD. Evaluasi makroekonomi lebih difokuskan pada kinerja perekonomian secara makro yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai.

KONSEP DAN METODOLOGI

PDRB Dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB diartikan sebagai nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dihitung dengan pendekatan pendapatan, pendekatan hasil produksi, serta pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan yang menghitung PDRB dari empat komponen pendapatan (upah/gaji, bunga, sewa, dan laba) belum dipergunakan di Indonesia, sehingga pendapatan nasional maupun PDRB menggunakan pendekatan hasil produksi dari sektor ekonomi atau lapangan usaha, serta pendekatan pengeluaran dari empat sektor (rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri).

PDRB dihitung menggunakan dasar harga berlaku (current price) dan harga konstan (constant price). PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut juga dengan PDRB nominal, sehingga nilai output dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Sebaliknya, PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga konstan disebut juga dengan PDRB riil karena nilai output dihitung berdasarkan patokan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). PDRB ini disebut dengan PDRB riil karena secara riil mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan output dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi). PDRB atas dasar harga konstan ini dijadikan dasar dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan nilai output dari satu periode ke periode berikutnya.

Demografi Dan Ketenagakerjaan

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

- a. Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- d. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- e. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta

Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Surakarta pada tahun 2010 mencapai Rp21,49 trilyun dan pada tahun 2019 naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp48 trilyun, namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebagai akibat pandemi Covid-19 sehingga PDRB ADHB Kota Surakarta turun menjadi Rp47,6 trilyun atau turun sebesar -0,75% dibanding tahun 2019. Pada masa pasca pandemic Covid-19, yaitu pada tahun 2021 PDRB ADHB Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 4,01% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi pertanda bahwa perekonomian Surakarta berangsur-angsur pulih pada masa pasca pandemi Covid-19.

Secara relatif, dari tahun 2020 sektor yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 adalah sektor Industri Pengolahan dari -4,01% menjadi 6,13%; Pengadaan Listrik dan Gas dari 1,59% menjadi 6,85%; Perdagangan Besar dan Eceran dari -5,18% menjadi 5,75%; Transportasi dan Pergudangan dari -62,54% menjadi 3,46%;

Akomodasi dari -16,2% menjadi 8,43%; serta Jasa Keuangan dan Asuransi dari 2,13% menjadi 2,28%.

Bila dihitung pada periode 2019-2020 yaitu masa pandemi Covid-19, sektor informasi dan komunikasi pada PDRB ADHB menunjukkan kenaikan tertinggi yaitu 20,21% disusul kemudian sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 16,32%. Sementara itu pada periode yang sama, sektor dengan penurunan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar -60,63% serta sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar -16,05%. Penurunan tersebut memiliki keterkaitan erat Kota Surakarta sebagai salah satu destinasi wisata dan kota perdagangan, sehingga aspek transportasi serta akomodasi makana dan minum terdampak langsung secara signifikan.

Dari sisi struktur PDRB, pada tahun 2021 PDRB Surakarta didominasi oleh 4 sektor utama, yaitu sektor konstruksi (26,65%), sektor perdagangan besar dan eceran (21,96%), sektor informasi dan komunikasi (14,86%), serta sektor industri pengolahan (8,66%). Proporsi sektor tersebut selama 2012-2021 meski berfluktuasi namun cenderung konstan. Sektor konstruksi, perdagangan besar, serta industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seementara sektor informasi dan komunikasi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh saat pandemi, sektor tersebut menjadi salah satu sektor yang tumbuh dengan signifikan seiring dengan kebutuhan komunikasi yang meningkat drasti di masa pandemi. Namun saat kondisi mulai berangsur pulih dan kegiatan mulai berjalan normal pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi mulai menurun.

Tabel .1

**Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2011-2020**

Lapangan Usaha	Proporsi				Pertumbuhan				2020 2021		TREN 2012 2021	
	2012	2019	2020	2021	2012	2019	2020	2021	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,49	0,51	0,50	2,40	2,96	1,53	2,14	Turun	Naik	Turun	Turun
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-64,49	-5,15	-11,77	Turun	Turun	Turun	Turun
C. Industri Pengolahan	8,27	8,45	8,44	8,66	7,35	5,88	-4,01	6,13	Naik	Naik	Naik	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,20	0,20	0,21	12,55	5,21	1,59	6,85	Naik	Naik	Turun	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,14	0,16	0,14	-7,54	4,74	3,27	-4,30	Turun	Turun	Turun	Turun
F. Konstruksi	26,99	27,10	27,04	26,65	5,45	4,61	-1,97	0,69	Turun	Naik	Turun	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,34	22,16	21,64	21,56	2,06	5,18	-5,18	5,75	Naik	Naik	Turun	Naik
H. Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,59	1,03	1,04	6,44	7,32	-62,54	3,16	Naik	Naik	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,36	5,41	4,55	4,72	7,82	5,21	-16,20	8,43	Naik	Naik	Turun	Naik
J. Informasi dan Komunikasi	11,23	12,01	14,55	14,86	11,81	10,12	19,70	7,68	Naik	Turun	Naik	Turun
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,75	3,90	3,91	2,98	4,44	2,13	2,28	Naik	Naik	Naik	Turun
L. Real Estate	1,09	3,85	3,97	3,92	7,07	2,98	0,73	3,72	Turun	Naik	Turun	Turun
M. N. Jasa Perusahaan	0,69	0,85	0,81	0,80	7,18	9,53	-8,53	2,16	Turun	Naik	Naik	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	5,41	5,39	5,11	1,66	3,90	2,15	0,19	Turun	Naik	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,87	5,51	5,67	5,44	10,56	5,98	-0,96	0,13	Turun	Naik	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,12	1,31	1,26	7,49	6,19	12,11	1,22	Turun	Turun	Naik	Turun
R, S, T, U. Jasa Lainnya	0,95	0,95	0,85	0,81	4,35	7,44	-14,32	0,07	Turun	Naik	Turun	Turun
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	5,58	5,77	-1,76	4,01				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

Berdasarkan Tabel 4.1 dari tahun 2012 sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2012 hingga 2021 dengan kenaikan kontribusi dari 8,27% di tahun 2012 menjadi 8,66% di tahun 2021, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang cukup besar yaitu dari 11,23% menjadi 14,86%, sektor jasa keuangan dan asuransi (3,71% menjadi 3,91%), sektor jasa perusahaan (dari 0,69% menjadi 0,80%), sektor jasa pendidikan (dari 4,87% menjadi 5,44%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (dari 1,01% menjadi 1,26%). Di tahun 2021 beberapa sektor yang menunjukkan penurunan proporsi meski tidak secara signifikan dibandingkan tahun 2012, yaitu sektor pertanian dari 0,51% menjadi 0,50%, sektor pengadaan listrik dan gas dari 0,22% menjadi 0,21%, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dari 0,19% menjadi 0,14%, sektor transportasi dan pergudangan dari 2,42% menjadi 1,04%, penyediaan akomodasi makan dan minuman dari 5,36% menjadi 1,72%. Pada sektor transportasi dan akomodasi, penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan pada kedua sektor tersebut, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020, kedua sektor tersebut telah menunjukkan peningkatan proporsi.

Selama 2011-2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta secara perlahan menunjukkan tren yang menurun meskipun relative kecil. Meskipun tren 2014-2019 cenderung konstan. Posisi Kota Surakarta sebagai salah satu kota wisata dan budaya, perdagangan, serta Pendidikan membuat cukup rentan terhadap guncangan factor eksternal, terlebih posisi geografis Kota Surakarta yang strategis. Hal tersebut yang menyebabkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun pada tahun 2021, telah terjadi peningkatan yang menjadi tanda bahwa perekonomian Kota Surakarta mulai kembali pulih pada masa pasca Pandemi Covid-19.

PDRB Perkapita

PDRB atas dasar harga berlaku apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menghasilkan PDRB Perkapita nominal. Jumlah penduduk didasarkan pada data BPS Kota Surakarta. PDRB perkapita merupakan salah satu indicator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan pendapatan per orang per tahun. Berdasarkan perhitungan PDRB ADHB, selama 2010-2021 PDRB perkapita Kota Surakarta menunjukkan tren yang terus meningkat. Kenaikan tiap tahun PDRB perkapita sepanjang 2010-2021 terlihat berfluktuasi. Hanya pada tahun 2020, PDRB perkapita mengalami koreksi. Terdampaknya perekonomian Kota Surakarta tersebut membuat perekonomian tertekan dan di saat yang sama hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk Kota Surakarta. PDRB perkapita ADHB tahun 2020 1,03%. Pada tahun 2021 PDRB perkapita ADHB sebesar Rp96,36 juta, naik sebesar 5,7%. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut menandakan bahwa sektor-sektor perekonomian mulai bangkit. Pemerintah telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Tabel .2

PDRB Perkapita Kota Surakarta Tahun 2010-2021

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Surakarta (BPS)	42.920.990	47.544.830	52.285.755	57.269.451	62.954.602	68.771.376	73.460.125	79.523.698	85.790.562	92.580.515	91.165.970	96.362.858
	Surakarta (Disdikcapil)												
2	Provinsi Jawa Tengah	19.209.309	21.162.830	22.865.435	24.952.127	27.517.837	29.933.748	31.961.952	34.234.314	36.770.961	39.200.188	38.578.125	38.669.113
3	Indonesia	28.778.200	32.363.700	35.105.200	38.365.900	41.915.900	45.140.700	47.957.400	51.000.000	56.000.000	59.100.000	57.120.389	61.236.444
4	Rata-rata Jawa Tengah	15.368.100	17.075.704	18.526.095	20.239.955	22.367.477	24.462.155	26.465.404	28.368.392	30.529.582	32.586.899	32.328.485	32.322.414
5	Rata-rata Kota di Jawa Tengah	30.438.448	33.807.502	36.801.468	40.135.785	44.074.547	47.845.027	51.859.040	55.685.731	59.959.505	64.378.469	63.375.107	66.886.344

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Bila dibandingkan dengan wilayah lain, penurunan PDRB perkapita ADHK Kota Surakarta masih lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup besar yaitu - 7,44%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata seluruh daerah di Jawa Tengah yang pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita sebesar -6,99%. Bila dibandingkan secara nasional, pada tahun 2020 PDRB perkapita nasional juga menunjukkan penurunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan Kota Surakarta yaitu -2,84%. Bila diperbandingkan antar kota di Jawa Tengah, penurunan PDRB perkapita Kota Surakarta hanya lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Tegal yang mengalami penurunan sebesar -10,79%.

Nilai PDRB perkapita Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta rata-rata kota di Jawa Tengah, jauh berada di atas. PDRB perkapita Kota Surakarta menduduki peringkat 2 di bawah Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi. Dengan demikian, iklim perekonomian di Kota Surakarta dapat dikatakan berjalan sangat dinamis. Dinamika perekonomian tersebut di sisi lain diimbangi dengan kemampuan Kota Surakarta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga menghasilkan PDRB perkapita yang tinggi sepanjang 2010-2021.

Inflasi

Sepanjang 2016-2021 inflasi di Surakarta berfluktuasi. Selama periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai hanya 1,38% dan yang tertinggi adalah tahun 2017 yang mencapai 3,1%. Penurunan inflasi yang sangat tajam terjadi pada tahun 2020, yaitu dari 2,94% di tahun 2019 menjadi 1,38% di tahun 2020. Inflasi tahun 2021 tercatat sebesar 2,58% dan angka ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1,38% sebagai akibat pandemic Covid-19. Situasi dan kondisi pandemi Covid mendorong perekonomian berjalan stagnan bahkan menurun. Kelesuan ekonomi tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah bawah akibat penurunan sumber penghasilan, sehingga mendorong penurunan inflasi di tahun 2020.

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Tingkat kemiskinan

Surakarta selama 2010-2019 terlihat menunjukkan tren penurunan dari 13,96% di tahun 2010 menjadi 8,7% di tahun 2019. Namun di tahun 2020 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 9,03% dan kembali meningkat menjadi 9,4% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang mengalami kenaikan dibandingkan 2019, dari 45.200 menjadi 47.030. Kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan karena penurunan bahkan hilangnya penghasan akibat situasi pandemic Covid 19 sementara garis kemiskinan sebagai batas antara kelompok miskin dan tidak miskin di tahun 2020 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2021, meskipun sektor-sektor perekonomian mulai menunjukkan pemulihan namun tidak serta merta mengurangi jumlah penduduk miskin di Surakarta.

Dalam hal tingkat kedalaman kemiskinan, pada tahun 2021 Kota Surakarta memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 sebesar 1,83 sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 sebesar 0,54, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Indeks P1 menunjukkan besarnya pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan, sehingga menurunnya angka P1 tersebut diduga karena banyaknya kelompok miskin baru yang sebelumnya di atas garis kemiskinan, namun saat itu berada tidak jauh di bawah garis kemiskinan.

Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja menjadi 288.959 atau naik sebesar 0,74% dan jumlah pengangguran naik sangat tajam menjadi 22.877 atau naik 90,59% sebagai dampak dari Pandemi Covid. Tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 282.178 dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.153. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran mengalami penurunan meskipun belum signifikan.

Tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama 2012-2021 menunjukkan tren peningkatan namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 92,08% dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 92,15%. Penurunan kesempatan kerja ini juga terjadi pada periode 2012-2013 yang berarti tingkat pengangguran mengalami kenaikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kinerja perekonomian Kota Surakarta menunjukkan penurunan selama 2020-2021 menunjukkan peningkatan sebagai wujud dari pemulihan berbagai sektor perekonomian pasca Pandemi Covid. Peningkatan berbagai sektor perekonomian tersebut belum berdampak secara signifikan pada kondisi kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan, peningkatan tingkat pengangguran, penurunan pengeluaran perkapita, serta penurunan pendapatan perkapita masyarakat.
2. Sektor dengan peningkatan proporsi kontribusi terhadap PDRB Kota Surakarta 2021 antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum, serta jasa keuangan dan asuransi.
3. Dikaitkan dengan kredit perbankan secara sektoral, sektor industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki alokasi kredit perbankan terbesar namun juga memiliki non performing loan (NPL) yang paling besar. Sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB justru tidak mendapatkan alokasi kredit perbankan yang besar.
4. Alokasi kredit perbankan memiliki dampak besar dalam menggerakkan perekonomian, hal ini terlihat dari nilai elastisitas antara kredit perbankan dengan sektor ekonomi. Secara keseluruhan kredit perbankan memiliki nilai elastisitas yang positif sehingga kenaikan kredit perbankan berpengaruh secara searah dengan penambahan nilai output PDRB.
5. Nilai ICOR Kota Surakarta untuk lag 1 periode menghasilkan angka yang tinggi, namun untuk lag 2 dan lag 3 periode menghasilkan angka yang jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dan pembentukan modal tetap di Kota Surakarta didominasi oleh investasi yang bersifat jangka Panjang sehingga baru menghasilkan (berdampak terhadap perekonomian) setelah 2-3 tahun ke depan.
6. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, kinerja perekonomian Kota Surakarta secara relative mengalami penurunan. Hal ini terlihat pemeringkatan beberapa indikator yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Rekomendasi

Jangka Pendek/Menengah

Tujuan: Pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan

Sasaran: Minimalisir dampak Covid serta mempercepat Pemulihan Ekonomi

1. Mapping data profil pelaku usaha terdampak Covid lintas sectoral/OPD dan integral (terpadu), meliputi: bidang usaha, omzet per hari (bulan), lamanya usaha dijalankan, profil keluarga, dan data relevan lain.
2. Evaluasi program dan kegiatan serta realokasi anggaran OPD.
3. Menyelenggarakan “bantuan pemberdayaan masyarakat produktif” dengan kriteria tertentu (usaha masih jalan, batasan omzet, jumlah tanggungan keluarga, KTP domisili, dsb), dan dilaksanakan dengan skema tertentu.
4. Memberikan “bantuan miskin produktif” khusus untuk kelompok miskin dan rentan miskin dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan sederhana memulai usaha mikro rumah tangga.

Jangka Menengah/Panjang

Tujuan: Penguatan ekonomi kreatif masyarakat

Sasaran: Mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal

1. Melaksanakan kerja sama dengan perusahaan dalam pelatihan yang bersertifikat, melalui skema CSR yang melibatkan perguruan tinggi maupun LSM. Perusahaan dapat berpartisipasi aktif dalam bentuk penyediaan dana, peralatan, instruktur, tempat magang, atau dalam bentuk lain.
2. Menyusun Perda atau Perwali yang mampu secara nyata memperjelas dan mempertegas kewajiban BUMD, perusahaan, dan lembaga ekonomi terkait dalam pemberdayaan warga miskin serta usaha mikro dan perorangan untuk mengoptimalkan konsep redistribusi pendapatan dan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
3. Pengembangan kegiatan Balai Latihan Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembekalan keterampilan teknis sebagai langkah awal memulai dan mengembangkan usaha sesuai keterampilan masing-masing.
4. Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Surakarta dalam beberapa bentuk: pengurangan/pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah, grace period, kepengurusan dokumen perizinan, kepemilikan lahan, dan sebagainya sesuai dengan

kriteria tertentu. Kebijakan ini harus diinformasikan secara luas ke berbagai daerah bahkan negara lain, bekerjasama dengan asosiasi terkait.

5. Menyusun agenda event setidak-tidaknya setahun sekali di Kota Surakarta (bekerjasama dengan pihak lain) dalam rangka menguatkan citra Surakarta sebagai kota wisata budaya, kota wisata kuliner, kota pendidikan, sebagai Langkah awal memulihkan kondisi perekonomian Kota Surakarta.
6. Mengembangkan ekonomi kreatif sesuai potensi masing-masing wilayah/kecamatan dengan prioritas utama yang memiliki multiplier effect besar dalam penyerapan tenaga kerja secara sektoral maupun spasial.
7. Reorientasi pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki outcome langsung dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, baik UMKM maupun IKM. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi dan investigasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2022. <https://surakartakota.bps.go.id>. Diakses 19 April 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. <https://jateng.bps.go.id>. Diakses 19 April 2021.